

112 Tindak Kriminal di Jadetabek Diungkap dalam Dua Pekan Operasi Sikat Jaya 2022

JAKARTA (IM) - Ratusan tindak pidana di wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi (Jadetekab), terjadi dalam kurun waktu 15 hari pada Desember 2022.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengky Haryadi menjelaskan bahwa terdapat 112 kasus tindak pidana itu terungkap selama Operasi Sikat Jaya 2022 yang berlangsung mulai 1 - 15 Desember 2022.

"Tujuan operasi ini adalah untuk memberantas segala bentuk tindak kriminal ataupun kejahatan, khususnya kejahatan jalanan, dalam rangka merespons daripada keresahan masyarakat," ujar Hengky di Mapolda Metro Jaya, Rabu (28/12).

Dari 112 kasus tersebut, kata Hengky, terdapat 168 pelaku yang tertangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga kuat melakukan pencurian, penganiayaan berat, pemerasan, hingga aksi premanisme.

"Selain itu terdapat pula tersangka Undang-Undang Darurat dan judi online," kata Hengky.

Kendati demikian, Hengky tidak menjelaskan secara terperinci jumlah masih-masih tersangka dalam setiap kasus yang terungkap. Dia hanya mengatakan bahwa terdapat sejumlah barang bukti yang disita, antara lain lima unit mobil, 37 unit motor dan sepuuk *airsoft gun*.

"Kemudian terdapat 13 bilah senjata tajam, serta alat kejahatan yang lain ataupun instrumental delik, yakni magnet pembuka, kunci, linggis, palu dan lain sebagainya," ungkap Hengky.

Seiring dengan pengungkapan ini, Hengky berharap bisa memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, sekaligus memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindak kriminal. "Secara general masyarakat umum agar tidak juga mengikuti pola pola terkait kejahatan yang dilakukan para tersangka ini," katanya. ● lus

FOTO: ANTARA



PEMUSNAHAN MIRAS JELANG TAHUN BARU
Petugas menggunakan alat berat memusnahkan botol minuman keras hasil sitaan di Makopolres Indramayu, Jawa Barat, Rabu (28/12). Sebanyak 19.500 botol Miras dimusnahkan jelang perayaan Tahun Baru 2023.

Korupsi BBM, Berkas Perkara Pemeriksaan Tiga Mantan Pimpinan DPRD Selama P21

BENGKULU (IM) - Berkas perkara tiga mantan pimpinan DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dalam kasus korupsi, dinyatakan lengkap atau P21.

Ketiganya dituduh melakukan tindak pidana korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat Dewan, DPRD Kabupaten Seluma, tahun anggaran 2018 silam, dinyatakan lengkap atau P21.

Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu, sebelumnya telah melakukan pemeriksaan mantan unsur pimpinan berikut anggota dewan pada Desember 2021.

Di mana sebanyak 8 orang, yakni, Husni Tamrin, Okti Fitriani, Ulil Umidi selaku unsur pimpinan Ansori, Teno Haika, Yudi Harzan, Romania serta Zainal Arifin. Lima diantaranya masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Seluma.

Pada awal tahun 2022, Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu menetapkan 3 dari 8 orang terpercika. Ketiganya merupakan mantan pimpinan DPRD kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol. Dodi Ruyatman mengatakan, berkas tiga

tersangka Husni Tamrin selaku ketua, Okti Fitriani dan Ulil Umidi sebagai Waka I dan II periode 2014-2018, setelah korupsi mekanisme yang cukup panjang akhirnya dinyatakan lengkap Kejaksaan.

"Berkas ketiga orang tersangka terkait dugaan korupsi BBM di Seluma, sudah lengkap. Tinggal menunggu petunjuk kejaksaan untuk pelimpahan tahap dua, dengan penyerahan barang bukti serta ketiga orang tersangkanya," kata Dodi, Rabu (28/12).

Untuk pelimpahan tahap dua, kata Dodi, kemungkinan dilaksanakan pada awal tahun 2022, sesuai dengan petunjuk dari pihak Kejaksaan.

"Pelimpahan tersangkanya ke Kejaksaan diperkirakan awal tahun," pungkas Dodi. Untuk diketahui, dugaan kasus yang melibatkan unsur pimpinan DPRD kabupaten Seluma pada periode 2014-2019, berdasarkan fakta persidangan tiga terpidana yakni Sekretaris Dewan E-S, F-L dan S-A selaku bendahara.

Sejak penetapan status tersangka terhadap ketiganya pada awal tahun 2022, berkas perkara para tersangka ini, sudah berulang kali bolak balik dari penyidik Polda Bengkulu ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu, setelah 11 bulan, pada akhir tahun 2022 berkas dinyatakan lengkap. ● lus

Anggota Polantas Jaktim Babak Belur Dikeroyok Sejumlah Remaja di Otista

JAKARTA (IM) - Seorang anggota Polisi unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Jakarta Timur, Briptu T, menjadi korban pengeroyokan tujuh remaja di Jalan Otista Raya, Kecamatan Jatinegara, Minggu (25/12) sekitar pukul 05.00 WIB.

Kasat Lantas Jakarta Timur, AKBP Edy Surasa menjelaskan, Briptu T dikeroyok setelah dihadang oleh tujuh remaja tersebut. Saat itu Briptu T sedang berjalan dari arah Otista Raya menuju Kampung Melayu.

"Briptu T sempat meminta kepada para pelaku untuk memberinya jalan, tapi permintaan tersebut diabaikan dan mereka justru melakukan pengeroyokan," ujar Edy saat dikonfirmasi, Rabu (28/12).

Lantaran dikeroyok, Briptu T mengalami luka memar di sejumlah bagian anggota

tubuhnya. Edy menjelaskan, Briptu T pun sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati.

"Anggota turun, meminta dengan sopan. 'Tolong berkenan minggir, kita mau tugas'. Tapi mereka langsung main pukul saja, dihajar. Korban luka memar di bagian mata, muka," ujar Edy.

Edy pun juga mengungkapkan, kasus pengeroyokan tersebut telah ditangani oleh Unit Satreskrim Polrestro Jakarta Timur. Ia pun menambahkan, salah satu dari tujuh remaja tersebut kini juga telah diamankan oleh unit Satreskrim guna dilakukan penyelidikan.

"Sudah ditangani Polres. Malah sudah ada satu pelaku yang tertangkap satu kemarin. Untuk korban sekarang masih istirahat dulu, dirawat di RS Polri Kramat Jati," terang Edy. ● lus

12 | PoliceLine

FOTO: ANTARA



BARANG BUKTI 43 KG SABU TANGKAPAN LANAL LHOKSEUMAWE

Danlanal Lhokseumawe Kolonel Marinir Dian Suryansyah (tengah) bersama unsur penegak hukum lainnya menunjukkan barang bukti (BB) sabu hasil tangkapan TNI AL di Markas Komando Lanal Lhokseumawe di Desa Pulo Rumkom, Dewantara, Aceh Utara, Aceh, Rabu (28/12). Tim Fleet One Quick Response (F1QR) dan tim Intel Lanal Lhokseumawe berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 43 kilogram narkotika jenis Sabu dan menangkap satu orang tersangka inisial NN (38) di perairan Meuraksa, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe pada Sabtu (24/12) untuk kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian Lhokseumawe untuk proses hukum.

Operasi Damai Cartenz Segera Berakhir Polri Evaluasi akan Diperpanjang atau Tidak

Penegakan hukum tidak dijadikan hal utama untuk mengatasi permasalahan di Papua dalam Operasi Damai Cartenz 2022.

JAKARTA (IM) - Operasi Damai Cartenz 2022 yang berisi satuan tugas (satgas) untuk menjaga situasi keamanan Papua bakal berakhir pada 31 Desember 2022. Mabes Polri akan mengevaluasi apakah operasi tersebut diperpanjang atau tidak di tahun 2023.

"Mabes Polri akan melakukan evaluasi, apakah ini akan diperpanjang atau tidak. Akan kita sampaikan," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/12).

Ramadhan mengatakan,

ketika Operasi Damai Cartenz 2022 berakhir maka personel yang tergabung di dalamnya akan kembali ke satuannya masing-masing.

Menurut Ramadhan, capaian-capaian Operasi Damai Cartenz juga akan dipertimbangkan dalam evaluasi tersebut.

"Kemudian, bila ada kendala nanti juga akan kita evaluasi. Tentu tujuan evaluasi tersebut akan kita perbaiki agar ke depannya operasi ini lebih baik lagi," kata Ramadhan.

Sebagai informasi, Operasi

Damai Cartenz 2022 mengedepankan tiga fungsi, yakni fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat (binmas), dan fungsi humas. Dalam operasi tersebut, penegakan hukum tidak dijadikan hal utama untuk mengatasi permasalahan di Papua.

Operasi Damai Cartenz awalnya bernama Satgas Nembangawi. Nama itu mulai berubah per 17 Januari 2022. Dalam Operasi Damai Cartenz turut melibatkan 1.925 personel yang terdiri dari 1.824 anggota Polri dan 101 anggota TNI.

Sebagai informasi, operasi Damai Cartenz hanya dilakukan di lima wilayah hukum Polres Papua, yaitu Wilayahnya Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak Ilaga.

Kelima wilayah tersebut dianggap rawan terjadi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal itu diketahui berdasarkan data statistik Polri.

Sedangkan untuk wilayah lain di luar lima wilayah itu, Polri akan melakukan operasi

Rastra Samara Kasih atau Rasaka guna menjaga keamanan di 23 wilayah hukum Polres di Papua.

Ke-23 daerah tersebut dinilai cenderung lebih aman. Operasi Rasaka sendiri dimulai 3 Februari hingga 31 Desember 2022.

Operasi Damai Cartenz dan Rasaka ini sama-sama mengedepankan pola persuasif dan preemtif dan mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat (binmas), intel dan humas. Hanya saja, operasi Rasaka tidak memiliki Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum).

Operasi Damai Cartenz mulai bekerja sejak 17 Januari 2022 lalu. Operasi ini berakhir pada 31 Desember 2022. Adapun Operasi Damai Cartenz merupakan pengganti dari Satuan Tugas (Satgas) Nembangawi yang biasanya bertugas menjaga situasi keamanan di Papua.

Dalam operasi itu akan melibatkan sebanyak 1.925 personel yang terdiri dari 101 anggota TNI dan 1.824 anggota Polri, dengan rincian 528 personel Polda Papua dan ada 1.296 personel bantuan atau backup Mabes Polri. ● lus

SIDANG PEMBUNUHAN BRIGADIR J Jubir RKUHP sebut Hasil Tes Poligraf Bisa Dijadikan Alat Bukti yang Sah

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Albert Aries menilai, hasil tes poligraf dapat menjadi alat bukti yang sah.

Hal itu disampaikan Albert saat menjadi saksi ahli di sidang pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Alber dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim penasihat hukum Richard terdakwa Eliezer atau Bharada E.

Kendati begitu, Albert mengatakan, menjadi kewenangan majelis hakim untuk dapat menggunakan hasil tes itu sebagai bahan pertimbangan terhadap amar putusan suatu perkara.

"Ketika hasil pemeriksaan itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya otoritatif hakim untuk menilai," kata Albert dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (28/12).

Di sisi lain, Albert menyatakan bahwa hasil tes poligraf belum digolongkan secara rinci menjadi alat

bukti atau barang bukti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

"KUHP membedakan alat bukti dengan barang bukti. Barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHP, alat bukti diatur Pasal 184 KUHP yang limitatif ada saksi, ada surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa," papar Albert.

"Ketika ada metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP karena prinsip hukum acara itu limitatif dan interaktif, terbatas dan memaksa," katanya.

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu berpandangan bahwa hasil tes poligraf memiliki kekuatan untuk dijadikan alat bukti dalam sebuah pemeriksaan perkara.

"Saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan *asesor evidence* itu tidak bisa mendapatkan dari alat bukti ahli, tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah," jelas Albert.

Dalam kasus ini, Richard

Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdys Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kwat Ma'ruf.

Berdasarkan hasil tes poligraf yang dilakukan saat proses penyidikan Ferdys Sambo dan Putri Candrawathi terindikasi bohong. Hal itu diungkapkan oleh ahli Poligraf dari Polri Aji Febriyanto AR Rosyid saat dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan, Rabu (14/12).

Skor tes poligraf Ferdys Sambo sebesar -8 dan Putri Candrawathi -25. Sementara itu, terhadap Kwat Ma'ruf mendapatkan skor +9 dan -13 lantaran dilakukan pemeriksaan 2 kali. Pemeriksaan terhadap Ricky Rizal juga dilakukan dua kali dengan hasil tes pertama +11 dan kedua +19. Sedangkan terhadap Richard mendapatkan skor +13.

Sebagai informasi, skor + menunjukkan seseorang yang dilakukan tes poligraf tidak terindikasi berbohong. Sedangkan skor - menunjukkan bahwa seseorang yang menjalani tes tersebut terindikasi berbohong. ● lus

Bripka HK Diduga Telantarkan Istri, Jalani Sidang Etik di Polda Metro Jaya

JAKARTA (IM) - Bripka HK, anggota Polsek Pondok Aren yang diduga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disertai perselingkuhan dan penelantaran istri, menjalani sidang kode etik profesi Polri (KEPP).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan berujar, Bripka HK menjalani sidang atas dugaan pelanggaran etik dan profesi yang dilakukannya pada Rabu (28/12).

"Iya, Bripka HK sedang menjalani sidang etik," ujar Zulpan saat dikonfirmasi, Rabu (28/12).

Kendati demikian, Zulpan belum menjelaskan lebih lanjut soal sidang KEPP yang dijalani Bripka HK di Bidang Profesi dan Pengaman (Propam) Polda Metro Jaya. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini sidang itu masih berlangsung. "Saat ini masih berlangsung," kata Zulpan.

Diberitakan sebelumnya, istri Bripka HK, I, mencurahkan isi hatinya di media sosial. I mengaku telah diselingsuhi dan ditelantarkan oleh HK. I mengungkapkan video yang berisi sejumlah foto dia bersama suaminya dan bukti percakapan suami bersama beberapa wanita yang diduga selingkuhan.

"Yang diakuinya lebih dari empat perempuan di anggota sahabat polisi Indonesia dan pegawai sipil Kementerian PUPR," tulis I dalam keterangan foto dan video unggahannya.

Lewat akun Instagramnya, Bhayangkari Polres Tangerang Selatan itu mengaku telah melaporkan Bripka HK ke Bidang Propam Polda Metro Jaya.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarly Solu membenarkan adanya dugaan kasus perselingkuhan dan penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Bripka HK.

"Untuk anggota tersebut sudah dalam proses pemeriksaan Propam Polda, baik tindak pidananya ditangani Polda," ujar Sarly, Jumat (11/11).

"Untuk kasus etik atau disiplin dilaporkan ke Polda 16 Juni 2022 dan tanggal 13 Oktober 2022 panggilan klarifikasi," lanjut Sarly. Menurut Sarly, Bripka HK tidak hanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik dan profesi Polri, tetapi juga terkait KDRT. Laporan terkait tindak pidana tersebut dilaporkan oleh istri Bripka HK ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2022.

Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor untuk pemeriksaan juga sudah dilayangkan.

"Dilaporkan tanggal 22 Agustus 2022 dan tanggal 2 September 2022, sudah ada panggilan untuk Bripka HK," kata Sarly.

Sarly menyebutkan bahwa kasus KDRT yang dilakukan anggota Polsek Pondok Aren itu ditangani oleh Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya. ● lus

FOTO: ANTARA



PENCARIAN KORBAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MAROS

Sejumlah tim SAR gabungan melakukan pencarian korban tanah longsor yang terseret arus sungai di Desa Rompegading, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (28/12). Tim SAR gabungan telah menemukan satu korban meninggal dunia dan lima orang lainnya masih dalam pencarian.